



# Etika Epistemik dalam Perang Informasi: Analisis Filosofis terhadap Pembentukan Persepsi Publik pada Konflik Perbatasan Thailand–Kamboja

*Epistemic Ethics in Information Warfare: A Philosophical Analysis of Public Perception Formation in the Thailand–Cambodia Border Conflict*

Seua Seuaplee<sup>1</sup>, M. Halkis<sup>2</sup>, Samsul Bahari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Strategi Pertahanan Udara, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Corresponding email: [seuaseuaplee@student.unhan.ac.id](mailto:seuaseuaplee@student.unhan.ac.id)

## Abstract

This study examines the role of epistemic ethics in information warfare, focusing on the formation of public perception in the Thailand–Cambodia border conflict, which re-escalated in 2025. The conflict has unfolded not only within the physical space of the border region but has also expanded into the information sphere, social media, and strategic communication involving states, media institutions, academics, and digital users. In conflict situations, information, rumors, fake news, selective presentation of facts, and nationalist narratives can significantly influence public emotions, levels of trust in state institutions, and societal attitudes toward opposing parties. Therefore, the central issue extends beyond merely determining which information is true or false; it also raises philosophical questions concerning what deserves to be believed, on what grounds such beliefs are justified, and who bears responsibility for the production and dissemination of truth. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach through literature review, content analysis, framing analysis, and SWOT analysis. The findings indicate that information warfare shapes public perception through four primary mechanisms: the framing of event meanings, the mobilization of nationalist emotions, the simplification of conflict realities into “us versus them” binaries, and the erosion of trust in official sources. This study argues that strengthening public epistemic ethics is a critical prerequisite for information resilience and national cognitive resilience.

**Keywords:** epistemic ethics; information warfare; public perception; disinformation; Thailand–Cambodia border conflict; cognitive resilience.

## Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran etika epistemik dalam perang informasi, dengan fokus pada pembentukan persepsi publik pada konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang kembali memanas pada tahun 2025. Konflik tersebut tidak hanya berlangsung di ruang fisik wilayah perbatasan, tetapi juga meluas ke ruang informasi, media sosial, dan komunikasi strategis yang melibatkan negara, media, akademisi, dan pengguna digital. Dalam situasi konflik, informasi, rumor, berita palsu, seleksi fakta, dan narasi nasionalistik dapat memengaruhi emosi publik, tingkat kepercayaan terhadap negara, serta sikap masyarakat terhadap pihak lain. Oleh karena



itu, persoalan utama bukan sekadar menyangkut “informasi mana yang benar atau salah”, melainkan juga pertanyaan filosofis mengenai apa yang layak dipercaya, atas dasar alasan apa, dan siapa yang bertanggung jawab atas produksi serta penyebaran kebenaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur, analisis isi, analisis framing, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perang informasi membentuk persepsi publik melalui empat mekanisme utama, yaitu pembingkai makna peristiwa, mobilisasi emosi nasionalistik, penyederhanaan realitas konflik ke dalam oposisi “kita” dan “mereka”, serta erosi kepercayaan terhadap sumber resmi. Penelitian ini berargumen bahwa penguatan etika epistemik masyarakat merupakan syarat penting bagi ketahanan informasi dan ketahanan kognitif nasional.

**Kata kunci:** etika epistemik; perang informasi; persepsi publik; disinformasi; konflik perbatasan Thailand–Kamboja; ketahanan kognitif.

## 1. Pendahuluan

Konflik perbatasan Thailand–Kamboja merupakan salah satu isu paling sensitif di kawasan Asia Tenggara karena berkaitan dengan sejarah kolonial, kedaulatan wilayah, warisan budaya, dan emosi kolektif masyarakat kedua bangsa. Akar sengketa ini dapat ditelusuri hingga penetapan garis batas oleh otoritas kolonial Prancis pada awal abad ke-20 serta putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) mengenai status Kuil Preah Vihear pada tahun 1962, yang kembali dipertegas melalui putusan interpretasi pada tahun 2013 (International Court of Justice, 1962, 2013). Meskipun putusan hukum internasional telah dikeluarkan, ketegangan di lapangan tidak pernah benar-benar reda dan kembali meningkat secara signifikan pada pertengahan tahun 2025 hingga memicu bentrokan bersenjata di sepanjang perbatasan serta pernyataan resmi dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang mendesak kedua pihak menahan diri (ASEAN, 2025a, 2025b).

Ketika ketegangan meningkat di wilayah perbatasan, informasi menyebar dengan sangat cepat melalui media massa dan media sosial. Masyarakat memahami situasi bukan semata-mata melalui fakta di lapangan, melainkan melalui gambar, video, klaim, dan interpretasi yang disebar oleh berbagai aktor komunikasi, mulai dari lembaga negara dan media arus utama hingga akun anonim di platform digital. Sebuah kajian oleh organisasi pemeriksa fakta Cofact (2025) mencatat bahwa konflik Thailand–Kamboja memunculkan gelombang konten yang secara sengaja dibuat menarik secara emosional meskipun tidak seluruhnya akurat, sehingga masyarakat cenderung membagikannya tanpa verifikasi yang memadai.

Pada era digital, konflik tidak lagi terbatas pada medan fisik, tetapi juga berlangsung dalam medan informasi dan medan kognitif. Perang informasi (information warfare) dan

perang kognitif (cognitive warfare) menjadi instrumen penting untuk membangun legitimasi, melemahkan kredibilitas pihak lain, membangkitkan solidaritas nasional, serta membentuk persepsi publik agar mendukung sikap politik atau keamanan tertentu (Deppe & Schaal, 2024). Karakter peperangan semacam ini sejalan dengan apa yang dalam kajian strategi pertahanan disebut sebagai perang generasi kelima dan keenam (fifth and sixth generation warfare), yakni bentuk peperangan asimetris yang tidak lagi mengandalkan kekuatan militer konvensional semata, melainkan juga instrumen hukum, narasi, dan informasi sebagai medan pertempuran utama (Aulia et al., 2024).

Masalah penting dalam konteks ini adalah bahwa masyarakat tidak selalu mengambil sikap berdasarkan fakta yang lengkap, tetapi sering kali berdasarkan informasi yang telah diseleksi, didramatisasi, atau diulang terus-menerus hingga terasa sebagai kebenaran. Fenomena ini berkaitan erat dengan apa yang oleh Fricker (2007) disebut sebagai ketidakadilan epistemik (epistemic injustice), yaitu kondisi ketika kredibilitas seseorang atau suatu kelompok dinilai secara tidak proporsional akibat prasangka identitas, sehingga suara pihak tertentu—termasuk otoritas resmi negara tetangga—cenderung didiskreditkan terlebih dahulu, terlepas dari kebenaran isi pesannya. Oleh karena itu, analisis perang informasi perlu memperhatikan dimensi keamanan sekaligus dimensi filosofis, terutama etika epistemik yang berkaitan dengan tanggung jawab dalam mencari, mempercayai, dan menyebarkan pengetahuan (Code, 1987; Goldman, 1999).

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis bagaimana perang informasi dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja membentuk persepsi publik; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan dan penyebaran informasi di tengah situasi konflik; dan (3) merumuskan bagaimana prinsip etika epistemik dapat digunakan sebagai dasar filosofis untuk memperkuat ketahanan informasi dan ketahanan kognitif masyarakat.

## **2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Teoritis**

### **2.1 Etika Epistemik dan Epistemologi Sosial**

Etika epistemik merupakan cabang filsafat yang memandang tindakan mempercayai, mengetahui, dan menyebarkan informasi sebagai tindakan yang memiliki dimensi moral dan tanggung jawab sosial, bukan sekadar persoalan kognitif individual. Code (1987) menegaskan bahwa terdapat tanggung jawab epistemik (epistemic responsibility), yakni kewajiban moral

seseorang untuk berusaha secara sungguh-sungguh memperoleh keyakinan yang didukung bukti memadai sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Pandangan ini menempatkan proses mempercayai sesuatu bukan sebagai peristiwa pasif, melainkan sebagai tindakan yang dapat dinilai secara etis, sama seperti tindakan moral lainnya.

Goldman (1999) memperluas pandangan ini melalui gagasan epistemologi sosial (social epistemology), yang menekankan bahwa pengetahuan tidak dihasilkan secara terisolasi oleh individu, melainkan melalui interaksi sosial, institusi, dan praktik komunikasi kolektif. Dalam kerangka ini, kualitas pengetahuan suatu masyarakat sangat bergantung pada kualitas institusi yang memproduksi dan mendistribusikan informasi, termasuk media, lembaga pendidikan, dan lembaga negara. Ketika institusi tersebut gagal menjaga integritas epistemik, seluruh ekosistem pengetahuan masyarakat menjadi rentan terhadap distorsi.

Fricker (2007) menambahkan dimensi kritis melalui konsep ketidakadilan epistemik, yang terdiri atas testimonial injustice, yaitu ketika kesaksian seseorang diberi bobot kredibilitas lebih rendah karena prasangka identitas, dan hermeneutical injustice, yaitu ketika suatu kelompok tidak memiliki kerangka konseptual yang memadai untuk memahami dan mengomunikasikan pengalamannya. Dalam konteks konflik antarnegara, testimonial injustice dapat terjadi ketika pernyataan resmi dari salah satu pihak secara otomatis dianggap tidak kredibel oleh publik negara lain, terlepas dari validitas faktualnya, semata-mata karena sumber tersebut berasal dari “pihak lawan”.

Rini (2017) melengkapi diskusi ini dengan konsep partisan epistemology dalam konteks berita palsu, yaitu kecenderungan seseorang menilai kebenaran suatu informasi bukan berdasarkan bukti, melainkan berdasarkan kesesuaiannya dengan identitas kelompok atau afiliasi yang telah dianut sebelumnya. Ketiga kerangka ini, yakni tanggung jawab epistemik, epistemologi sosial, dan ketidakadilan epistemik, menjadi fondasi filosofis utama untuk memahami mengapa masyarakat dapat mempercayai informasi yang keliru dalam situasi konflik perbatasan, sekaligus menjadi dasar normatif untuk merumuskan sikap epistemik yang lebih bertanggung jawab.

## **2.2 Perang Informasi dan Perang Kognitif**

Perang informasi (information warfare) didefinisikan oleh Floridi dan Taddeo (2012) sebagai penggunaan informasi dan teknologi informasi untuk mendapatkan keunggulan strategis atas pihak lawan, baik dalam ranah militer, politik, maupun ekonomi. Definisi ini

menegaskan bahwa informasi bukan lagi sekadar alat pendukung strategi, melainkan telah menjadi medan pertempuran itu sendiri. Dalam konflik perbatasan, perang informasi dapat muncul melalui penyebaran rumor, penggunaan gambar lama atau gambar di luar konteks, narasi nasionalistik, tuduhan tanpa bukti yang cukup terhadap pihak lain, hingga penggunaan konten hasil rekayasa digital.

Perkembangan teknologi turut memperluas cakupan ancaman ini. Chesney dan Citron (2019) memperingatkan bahwa teknologi deepfake berpotensi menjadi tantangan serius bagi keamanan nasional dan demokrasi karena mampu menciptakan bukti visual palsu yang sangat meyakinkan sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli, suatu ancaman yang relevan dalam konflik perbatasan ketika bukti visual sering menjadi rujukan utama opini publik.

Konsep perang kognitif (cognitive warfare) memperluas gagasan perang informasi dengan menyasar bukan hanya arus informasi, tetapi juga proses berpikir, keyakinan, dan pengambilan keputusan target secara langsung. Deppe dan Schaal (2024) menjelaskan bahwa NATO Allied Command Transformation (ACT) mengonseptualisasikan perang kognitif sebagai upaya sistematis untuk memengaruhi cara berpikir suatu populasi hingga tingkat sedemikian rupa sehingga populasi tersebut bertindak sesuai kepentingan pihak penyerang tanpa menyadarinya. Miller (2023) menganalisis dimensi etis dari perang kognitif dan menegaskan bahwa manipulasi terhadap otonomi kognitif seseorang, termasuk melalui manipulasi emosi dan bias kognitif, merupakan pelanggaran terhadap martabat epistemik individu karena mengubah orang dari subjek yang berpikir mandiri menjadi objek yang dikendalikan oleh narasi pihak lain.

Dengan demikian, perang informasi dan perang kognitif dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teknis penyebaran hoaks, tetapi juga sebagai persoalan etis mengenai integritas kognitif dan otonomi berpikir masyarakat kedua negara.

### **2.3 Disinformasi, Propaganda, dan Manipulasi Media**

Disinformasi berbeda dengan misinformasi karena mengandung unsur kesengajaan untuk menyesatkan. Zannettou dkk. (2018), melalui kajian terhadap troll yang disponsori negara di platform Twitter, menunjukkan bagaimana aktor-aktor tersembunyi secara sistematis menyebarkan narasi terkoordinasi untuk memengaruhi opini publik lintas negara, sering kali dengan menyamar sebagai warganet biasa. Pola serupa berpotensi muncul dalam konflik

perbatasan, ketika akun-akun anonim dapat memperkeruh suasana dengan menyebarkan klaim yang sulit diverifikasi asal-usulnya.

Szostek (2020) mengkaji bagaimana diplomasi publik mengalami tantangan serius pada masa perang informasi karena pesan resmi suatu negara harus bersaing dengan derasnya arus narasi tandingan yang diproduksi aktor non-negara maupun negara lawan. Ia menekankan pentingnya komunikasi strategis yang konsisten dan berbasis bukti agar pesan resmi tidak kalah cepat dan kalah menarik dibandingkan narasi yang bersifat provokatif.

Pada level yang lebih luas, Snyder (2018) mengingatkan bahwa manipulasi informasi dapat digunakan secara sistematis oleh suatu negara untuk melemahkan kohesi sosial negara lain, sedangkan Pomerantsev (2019) menggambarkan bagaimana era digital telah melahirkan bentuk propaganda baru yang tidak lagi berusaha meyakinkan satu kebenaran tunggal, melainkan menciptakan kebingungan dan ketidakpercayaan terhadap segala bentuk kebenaran (truth decay). Kondisi semacam ini sangat berbahaya dalam konflik perbatasan karena publik yang kehilangan kepercayaan terhadap seluruh sumber informasi, termasuk sumber yang kredibel, akan semakin sulit diajak untuk bersikap tenang dan rasional.

#### **2.4 Framing Media dan Pembentukan Persepsi Publik**

Entman (1993) menjelaskan bahwa framing adalah proses menyeleksi aspek tertentu dari suatu realitas dan menonjolkannya dalam teks komunikasi sedemikian rupa sehingga mendefinisikan masalah, menafsirkan penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan solusi tertentu. Dengan kata lain, media tidak hanya melaporkan peristiwa, tetapi turut membentuk makna peristiwa tersebut bagi khalayak.

Iyengar (1994) menambahkan bahwa cara media membingkai suatu isu, apakah sebagai persoalan episodik (kejadian tunggal) atau tematik (pola struktural yang lebih luas), memengaruhi bagaimana publik menilai siapa yang bertanggung jawab atas suatu masalah. Dalam konflik perbatasan, pembingkaiian episodik terhadap insiden kekerasan cenderung memicu penilaian emosional dan tuduhan cepat terhadap pihak lawan, sementara pembingkaiian tematik yang menempatkan insiden dalam konteks sejarah panjang sengketa dapat mendorong pemahaman yang lebih kompleks meski berisiko dimanfaatkan untuk membenarkan narasi historis sepihak.

Kajian terbaru oleh Gomar (2025) mengenai kepercayaan publik terhadap pemberitaan perang menemukan bahwa bias media dan pembingkaihan yang bermuatan emosi secara signifikan memengaruhi tingkat kepercayaan audiens terhadap liputan konflik, sekaligus menegaskan bahwa transparansi dan akurasi pemberitaan merupakan faktor penentu utama kredibilitas media di mata publik pada masa konflik.

## **2.5 Konflik Perbatasan Thailand–Kamboja dan Sengketa Preah Vihear**

Secara historis, sengketa Thailand–Kamboja bermula dari penarikan garis batas oleh otoritas kolonial Prancis atas wilayah Kamboja pada awal abad ke-20, yang kemudian menjadi dasar putusan ICJ pada tahun 1962 yang menetapkan Kuil Preah Vihear berada dalam kedaulatan Kamboja (International Court of Justice, 1962). Meskipun demikian, wilayah di sekitar kuil tetap menjadi sumber sengketa, sehingga pada tahun 2013 Kamboja kembali mengajukan permohonan interpretasi atas putusan tersebut kepada ICJ, yang pada akhirnya menegaskan kembali kedaulatan Kamboja atas kawasan sekitar kuil (International Court of Justice, 2013).

Silverman (2011) menjelaskan bahwa sengketa perbatasan ini tidak dapat dilepaskan dari politik kedaulatan dan pembentukan identitas nasional di kedua negara, di mana garis batas tidak sekadar dipahami sebagai persoalan teknis-geografis, melainkan sebagai simbol kehormatan dan keutuhan bangsa. Pavin (2011) memperdalam analisis ini dengan menunjukkan bahwa isu Preah Vihear kerap dimanfaatkan oleh elite politik dan militer di Thailand sebagai instrumen untuk membangkitkan sentimen nasionalisme domestik, terutama pada masa ketidakstabilan politik internal, sehingga isu perbatasan sering kali lebih banyak digerakkan oleh kepentingan politik domestik dibandingkan oleh ancaman keamanan yang sesungguhnya.

Dimensi asimetris dari konflik ini juga tampak dalam pola strategi militer non-konvensional yang secara historis pernah diterapkan di kawasan tersebut. Vun, Susanto, dan Halkis (2024) mengkaji taktik gerilya dan pertahanan wilayah era Khmer Rouge di bawah kepemimpinan Pol Pot, yang menunjukkan bahwa kawasan perbatasan Thailand–Kamboja memiliki sejarah panjang sebagai medan strategi pertahanan asimetris, jauh sebelum era perang informasi digital. Warisan strategi asimetris tersebut relevan untuk memahami mengapa kawasan ini kembali menjadi arena pertarungan naratif dan informasi pada era kontemporer.

## **2.6 Perang Generasi Kelima dan Keenam sebagai Kerangka Strategi Pertahanan**



Aulia, Halkis, dan Timur (2024) menjelaskan bahwa perang generasi kelima dan keenam ditandai oleh pergeseran medan pertempuran dari ranah fisik-militer menuju ranah hukum, narasi, siber, dan informasi, sehingga instrumen non-militer seperti politik hukum (legal politic) menjadi sarana penting untuk melawan peperangan asimetris. Dalam kerangka ini, penguasaan narasi dan legitimasi hukum menjadi setara pentingnya dengan penguasaan wilayah secara fisik.

Halkis (2022) dalam kajian filsafat ilmu pertahanan menegaskan bahwa ilmu pertahanan kontemporer perlu dibangun di atas fondasi epistemologis yang kokoh, karena keputusan strategis pertahanan, termasuk dalam menghadapi perang informasi, senantiasa bergantung pada kualitas pengetahuan yang mendasarinya. Sebuah strategi pertahanan yang dibangun di atas informasi yang keliru atau bias epistemik akan menghasilkan kebijakan yang rapuh dan berisiko memperburuk eskalasi.

Kerangka ini menegaskan bahwa etika epistemik bukan sekadar wacana filosofis abstrak, melainkan komponen strategis dalam ilmu pertahanan itu sendiri. Kemampuan suatu bangsa untuk membedakan informasi yang valid dari informasi yang menyesatkan merupakan bagian integral dari kapabilitas pertahanan nasional dalam menghadapi peperangan generasi kelima dan keenam.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami fenomena perang informasi dan pembentukan persepsi publik dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian bukan pada pengukuran kuantitatif penyebaran informasi, melainkan pada pemaknaan, interpretasi, dan analisis filosofis terhadap fenomena epistemik yang menyertai konflik.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup literatur akademik di bidang filsafat pengetahuan, etika, ilmu komunikasi, dan studi pertahanan; pemberitaan media massa nasional dan internasional terkait eskalasi konflik perbatasan tahun 2025; konten media sosial dan hasil pemeriksaan fakta dari lembaga independen seperti Cofact (2025); pernyataan resmi lembaga regional seperti ASEAN (2025a, 2025b); serta dokumen hukum internasional dari ICJ (1962, 2013) sebagai konteks historis-legal sengketa.

Teknik analisis data yang digunakan terdiri atas empat tahap. Pertama, analisis isi (content analysis) digunakan untuk mengidentifikasi tema, narasi, dan pola pembingkai informasi yang muncul dalam pemberitaan dan konten media sosial terkait konflik. Kedua, analisis framing berdasarkan kerangka Entman (1993) digunakan untuk mengurai bagaimana peristiwa dimaknai, siapa yang digambarkan sebagai korban atau agresor, dan solusi apa yang direkomendasikan oleh masing-masing narasi. Ketiga, analisis filosofis digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab epistemik yang melekat pada tindakan memercayai dan menyebarkan informasi, dengan merujuk pada kerangka etika epistemik Code (1987), Goldman (1999), dan Fricker (2007). Keempat, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kapasitas ketahanan informasi Thailand dalam menghadapi perang informasi, sekaligus merumuskan strategi mitigasi yang relevan.

Keempat tahap analisis tersebut kemudian disintesis untuk merumuskan rekomendasi strategis penguatan ketahanan epistemik dan ketahanan informasi nasional dalam konteks konflik perbatasan yang terus berkembang.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa perang informasi dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja memengaruhi persepsi publik melalui empat mekanisme utama yang saling berkaitan, ditambah satu dimensi mendasar yang melandasi keseluruhan proses tersebut.

Pertama, perang informasi membentuk cara masyarakat memahami peristiwa melalui pembingkai makna (framing). Sejalan dengan kerangka Entman (1993), informasi tertentu ditonjolkan sedemikian rupa, misalnya dengan menampilkan kerusakan, korban, atau tuduhan terhadap pihak lain, sehingga masyarakat merasa bahwa pihaknya adalah korban yang sepenuhnya benar, sedangkan pihak lain dipandang sebagai agresor tunggal. Pembingkai episodik semacam ini, sebagaimana dijelaskan Iyengar (1994), mempersempit ruang bagi publik untuk memahami kompleksitas historis dan legal dari sengketa, termasuk fakta bahwa putusan ICJ (1962, 2013) sesungguhnya telah memberikan kerangka hukum yang jelas, namun tetap terbuka untuk ditafsirkan secara politis oleh masing-masing pihak.

Kedua, media sosial mempercepat penyebaran rumor dan berita palsu melalui mekanisme yang telah dijelaskan Zannettou dkk. (2018), yaitu penggunaan akun-akun tidak resmi, baik oleh warganet biasa maupun aktor terkoordinasi, untuk menyebarkan konten yang

mengandung emosi kuat seperti kemarahan, ketakutan, dan nasionalisme. Konten semacam ini terbukti lebih cepat dibagikan dibandingkan informasi yang netral dan kompleks, sebagaimana juga dicatat oleh Cofact (2025) dalam pemantauannya terhadap konten seputar konflik Thailand–Kamboja. Akibatnya, informasi yang belum diverifikasi dapat membentuk opini publik jauh lebih cepat daripada klarifikasi resmi yang biasanya memerlukan proses verifikasi berlapis.

Ketiga, persepsi publik dibentuk secara mendalam oleh identitas nasional, sejarah, dan memori kolektif, sebagaimana ditunjukkan oleh Silverman (2011) dan Pavin (2011) dalam kajian mereka mengenai politik kedaulatan di kawasan Preah Vihear. Ketika isu perbatasan dikaitkan dengan kehormatan nasional, masyarakat cenderung menganggap sikap kritis atau upaya verifikasi terhadap suatu berita sebagai tindakan yang kurang nasionalis, bahkan berpotensi dicap sebagai bentuk pengkhianatan simbolik. Fenomena ini sejalan dengan konsep partisan epistemology dari Rini (2017), yaitu kecenderungan menilai kebenaran berdasarkan kesesuaian dengan identitas kelompok, bukan berdasarkan bukti. Padahal, dalam perspektif etika epistemik Code (1987) dan Goldman (1999), verifikasi informasi justru merupakan bentuk tanggung jawab tertinggi terhadap bangsa dan keamanan nasional, karena mencegah negara mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang keliru.

Keempat, negara dan lembaga keamanan memiliki peran penting dalam membangun kredibilitas informasi. Apabila komunikasi resmi terlambat, tidak jelas, atau tidak konsisten, masyarakat akan mencari informasi dari sumber lain yang belum tentu akurat, sebagaimana diperingatkan Szostek (2020) dalam kajiannya mengenai tantangan diplomasi publik pada masa perang informasi. Kekosongan komunikasi resmi ini menjadi ruang subur bagi disinformasi dan propaganda, sebagaimana digambarkan Pomerantsev (2019), di mana ketidakpastian informasi justru dimanfaatkan untuk menciptakan kebingungan kolektif alih-alih narasi tunggal yang mudah dibantah.

Selain keempat mekanisme tersebut, penelitian ini juga menemukan dimensi kelima yang bersifat lebih mendasar, yaitu erosi kepercayaan terhadap sumber informasi secara umum (truth decay). Ketika masyarakat terpapar berulang kali oleh klaim yang saling bertentangan dari berbagai sumber, termasuk dugaan penggunaan gambar hasil rekayasa digital sebagaimana diperingatkan Chesney dan Citron (2019), kepercayaan terhadap seluruh ekosistem informasi, termasuk sumber yang sesungguhnya kredibel, ikut menurun. Kondisi ini menciptakan apa yang dalam perspektif Fricker (2007) dapat dipahami sebagai bentuk ketidakadilan epistemik

struktural, di mana kredibilitas dinilai bukan berdasarkan bukti, melainkan berdasarkan afiliasi identitas nasional pihak yang menyampaikan informasi.

Secara filosofis, masalah utama perang informasi dalam konflik ini adalah kecenderungan untuk membuat masyarakat memercayai klaim tanpa bukti yang memadai, sekaligus mendorong mereka menjadi penyebar aktif tanpa disadari. Tindakan membagikan informasi yang belum diverifikasi, betapapun kecil skalanya, menjadikan setiap individu bagian dari rantai perang informasi itu sendiri. Dengan demikian, sejalan dengan kerangka epistemologi sosial Goldman (1999), setiap pengguna media memiliki tanggung jawab epistemik ganda, yakni bukan hanya sebagai penerima informasi, tetapi juga sebagai produsen dan penyebar makna sosial yang turut menentukan arah persepsi publik secara kolektif. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan ketahanan informasi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan teknis seperti pemblokiran konten atau klarifikasi resmi, tetapi harus menyentuh dimensi etis-filosofis tentang bagaimana masyarakat memaknai tanggung jawabnya dalam berinteraksi dengan informasi.

## 5. Ringkasan Hasil Analisis dan Implikasi Strategis

Gambar 1 di bawah ini merangkum keterkaitan antara mekanisme perang informasi, faktor epistemik yang memengaruhi kepercayaan publik, dan implikasi strategisnya terhadap penguatan ketahanan informasi nasional Thailand dalam menghadapi konflik perbatasan dengan Kamboja.

Tabel 1. Ringkasan Hasil Analisis dan Implikasi Strategis

Aspek yang Dianalisis	Hasil Analisis	Implikasi terhadap Persepsi Publik	Arah Strategi
<b>Pembingkaiian Informasi</b>	Peristiwa perbatasan sering dibingkai sebagai konflik antara “kita” dan “mereka”.	Persepsi publik menjadi semakin terpolarisasi.	Komunikasi strategis perlu menekankan fakta, bukti, dan konteks.
<b>Berita Palsu dan Rumor</b>	Informasi yang belum terverifikasi menyebar dengan cepat melalui platform digital.	Menimbulkan kepanikan, kebencian, dan reaksi berbasis disinformasi.	Membangun sistem verifikasi cepat dan respons informasi yang adaptif.
<b>Emosi Nasionalistik</b>	Isu perbatasan sering dikaitkan dengan martabat dan kedaulatan nasional.	Masyarakat lebih mudah terpengaruh narasi emosional yang	Mendorong nasionalisme yang rasional, konstruktif,

		mendukung kelompoknya.	dan bertanggung jawab.
<b>Kredibilitas Negara</b>	Keterlambatan komunikasi resmi menciptakan kekosongan informasi.	Publik cenderung beralih ke sumber informasi nonresmi atau tidak kredibel.	Menerapkan prinsip komunikasi berbasis bukti <i>One Voice, One Message</i> .

**Keterangan:** Tabel ini merupakan hasil sintesis analitis penulis yang disusun berdasarkan kajian literatur, analisis isi, analisis framing, dan analisis SWOT terhadap dinamika perang informasi dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja.

## 6. Analisis SWOT

### *Strengths*

Thailand memiliki lembaga negara, militer, dan media arus utama yang mapan dan dapat menyampaikan informasi kepada publik secara terstruktur melalui saluran resmi. Selain itu, keberadaan lembaga pendidikan tinggi dan komunitas akademik yang aktif mengkaji isu pertahanan dan hukum internasional turut memperkuat kapasitas negara dalam menyusun narasi berbasis bukti. Apabila koordinasi antarlembaga berjalan baik, kapasitas ini dapat digunakan untuk membangun pemahaman publik yang akurat dan mengurangi ruang penyebaran berita palsu.

### *Weaknesses*

Komunikasi resmi terkadang lambat, terlalu teknis, atau tidak cukup responsif terhadap dinamika media sosial yang bergerak dalam hitungan menit. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan literasi digital dan kemampuan memeriksa sumber informasi, sehingga berita palsu dapat menyebar dengan cepat sebelum klarifikasi resmi diterbitkan. Fragmentasi kewenangan antarlembaga pemerintah dalam menangani komunikasi krisis juga dapat memperlambat respons yang terpadu.

### *Opportunities*

Situasi konflik dapat menjadi momentum untuk memperkuat literasi media, komunikasi strategis, dan budaya verifikasi fakta di kalangan masyarakat maupun aparat negara. Hal ini juga membuka peluang kerja sama antara negara, media, akademisi, lembaga pemeriksa fakta independen seperti Cofact, dan masyarakat sipil dalam membangun ketahanan informasi nasional yang lebih kolaboratif dan lintas sektor.

### *Threats*

Berita palsu, disinformasi terkoordinasi, operasi informasi dari berbagai aktor termasuk kemungkinan keterlibatan aktor non-negara, dan nasionalisme ekstrem dapat meningkatkan ketegangan antara masyarakat kedua negara. Perkembangan teknologi deepfake turut memperbesar risiko manipulasi bukti visual yang dapat memicu eskalasi tidak terkendali. Kombinasi faktor-faktor ini dapat berdampak pada kebijakan negara, stabilitas sosial, hubungan diplomatik regional melalui ASEAN, serta keamanan perbatasan dalam jangka panjang.

### **7. Strategi yang Direkomendasikan**

Strategi pertama adalah memperkuat etika epistemik masyarakat dengan menanamkan prinsip bahwa setiap informasi harus diperiksa sumber, bukti, dan konteksnya sebelum dipercaya atau dibagikan, sejalan dengan konsep tanggung jawab epistemik yang dikemukakan Code (1987). Prinsip ini perlu diinternalisasi sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk di lingkungan pendidikan pertahanan, agar menjadi kebiasaan berpikir kritis yang melekat, bukan sekadar imbauan situasional saat konflik terjadi.

Strategi kedua adalah membangun sistem komunikasi negara yang cepat, jelas, dan terpadu untuk menutup ruang kosong yang dapat dimanfaatkan oleh rumor dan berita palsu, sebagaimana ditekankan Szostek (2020) mengenai pentingnya komunikasi strategis yang konsisten. Sistem ini idealnya melibatkan satu pusat informasi resmi lintas kementerian dan lembaga sehingga publik memiliki rujukan tunggal yang kredibel di tengah derasnya arus informasi yang simpang siur.

Strategi ketiga adalah membentuk mekanisme verifikasi informasi kolaboratif yang melibatkan pemerintah, media, akademisi, lembaga pemeriksa fakta independen seperti Cofact, dan masyarakat sipil, agar proses klarifikasi memiliki kredibilitas publik yang tidak mudah dicurigai sebagai propaganda sepihak negara.

Strategi keempat adalah mengembangkan pendidikan literasi media dan perang informasi bagi prajurit, mahasiswa, dan masyarakat umum, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan keamanan perbatasan, dengan memasukkan materi mengenai pengenalan teknik framing, deteksi konten hasil rekayasa digital seperti deepfake (Chesney & Citron, 2019), serta pemahaman dasar mengenai epistemologi sosial (Goldman, 1999).

Strategi kelima adalah membangun narasi nasionalisme yang rasional, yaitu nasionalisme yang menjaga kepentingan nasional tanpa menciptakan kebencian terhadap masyarakat negara tetangga, sejalan dengan peringatan Pavin (2011) bahwa instrumentalisasi sentimen nasionalisme untuk kepentingan politik domestik justru berisiko memperburuk hubungan bilateral jangka panjang. Strategi ini idealnya diperkuat dengan diplomasi publik yang aktif memanfaatkan forum regional untuk menjaga saluran komunikasi antarnegara tetap terbuka di tengah eskalasi.

Strategi keenam adalah penguatan kerja sama regional melalui ASEAN sebagai forum mediasi dan penyampaian informasi resmi lintas negara, sebagaimana ditunjukkan oleh peran ASEAN (2025a, 2025b) dalam merespons eskalasi konflik tahun 2025, sehingga narasi resmi regional dapat menjadi penyeimbang terhadap narasi nasionalistik sepihak dari masing-masing negara.

## **8. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis, perang informasi dalam konflik perbatasan Thailand–Kamboja memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan persepsi publik. Informasi, rumor, berita palsu, dan narasi nasionalistik dapat membentuk pemahaman, rasa takut, kemarahan, serta sikap masyarakat terhadap pihak lain secara cepat, melalui mekanisme pembingkai makna, mobilisasi emosi, penguatan identitas kolektif, kegagalan komunikasi resmi, dan erosi kepercayaan terhadap sumber informasi secara umum.

Etika epistemik menjadi instrumen filosofis penting dalam menghadapi perang informasi karena menegaskan bahwa tindakan mempercayai dan membagikan informasi memiliki tanggung jawab sosial. Dengan merujuk pada kerangka tanggung jawab epistemik (Code, 1987), epistemologi sosial (Goldman, 1999), dan ketidakadilan epistemik (Fricker, 2007), penelitian ini menegaskan bahwa dalam konteks konflik, masyarakat tidak boleh hanya menjadi konsumen informasi, tetapi harus menjadi subjek epistemik yang kritis, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Penguatan ketahanan informasi membutuhkan kerja sama antara negara, militer, media massa, lembaga pendidikan, lembaga pemeriksa fakta independen, dan masyarakat sipil. Prinsip utama yang perlu dikembangkan adalah kebenaran, bukti, transparansi, kehati-hatian, dan komunikasi yang tidak membangun kebencian. Selain itu, penguatan kerja sama regional



melalui forum seperti ASEAN dapat menjadi penyeimbang penting terhadap narasi nasionalistik sepihak yang berpotensi memperburuk eskalasi.

Dengan pendekatan tersebut, upaya menghadapi perang informasi tidak hanya bertujuan untuk mengurangi berita palsu, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial, keamanan nasional, dan hubungan jangka panjang antara masyarakat Thailand dan Kamboja. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas mekanisme verifikasi kolaboratif serta dampak jangka panjang program literasi media terhadap ketahanan kognitif masyarakat di kawasan perbatasan.

### **Daftar Pustaka**

- ASEAN. (2025a, Juli 28). ASEAN Foreign Ministers' Statement on Thailand-Cambodia Border Dispute. ASEAN.
- ASEAN. (2025b, Juli 31). ASEAN Foreign Ministers' Statement on the Outcome of the Special Meeting Hosted by Malaysia to Address the Current Situation Between Cambodia and Thailand. ASEAN.
- Aulia, M. R. N., Halkis, M., & Timur, F. G. C. (2024). Legal politic as counter an asymmetrical warfare in the 5th & 6th generation war. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences*, 4(1), 480–488.  
<https://doi.org/10.55227/ijhess.v4i1.1030>
- Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. *California Law Review*, 107, 1753–1819.
- Code, L. (1987). *Epistemic responsibility*. Brown University Press.
- Cofact. (2025, September 17). Thailand–Cambodia border conflict: “Information warfare” sparks concerns over people sharing false but appealing content. Cofact.
- Deppe, C., & Schaal, G. S. (2024). Cognitive warfare: A conceptual analysis of the NATO ACT cognitive warfare exploratory concept. *Frontiers in Big Data*, 7.  
<https://doi.org/10.3389/fdata.2024.1452129>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>



- Floridi, L., & Taddeo, M. (2012). What is information warfare? *Philosophy & Technology*, 25(1), 1–4. <https://doi.org/10.1007/s13347-011-0040-8>
- Foucault, M. (1980). *Power/knowledge: Selected interviews and other writings, 1972–1977*. Pantheon Books.
- Fricke, M. (2007). *Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing*. Oxford University Press.
- Goldman, A. I. (1999). *Knowledge in a social world*. Oxford University Press.
- Gombar, V. (2025). Digital media and public perception: Analysing trust in war reporting and information bias. *TEM Journal*, 14(4), 3503–3513.
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Volume 1: Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Halkis, M. (2022). *Filsafat ilmu pertahanan: Suatu pengantar*. Unhan Press.
- International Court of Justice. (1962). *Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. ICJ.
- International Court of Justice. (2013). *Request for interpretation of the judgment of 15 June 1962 in the case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand)*. ICJ.
- Iyengar, S. (1994). *Is anyone responsible? How television frames political issues*. University of Chicago Press.
- Miller, S. (2023). Cognitive warfare: An ethical analysis. *Ethics and Information Technology*, 25(4), Article 52. <https://doi.org/10.1007/s10676-023-09717-7>
- O'Connor, C., & Weatherall, J. O. (2019). *The misinformation age: How false beliefs spread*. Yale University Press.
- Pavin, C. (2011). Temple of military dictatorship: Nationalism and Thailand–Cambodia conflict. *Contemporary Southeast Asia*.
- Pomerantsev, P. (2019). *This is not propaganda: Adventures in the war against reality*. Faber & Faber.
- Rini, R. (2017). Fake news and partisan epistemology. *Kennedy Institute of Ethics Journal*, 27(2), 43–64.



- Silverman, J. (2011). Conflict, borders, and the politics of sovereignty in the Thai-Cambodian border dispute. *Journal of Borderlands Studies*.
- Snyder, T. (2018). *The road to unfreedom: Russia, Europe, America*. Tim Duggan Books.
- Szostek, J. (2020). What happens to public diplomacy during information war? Critical reflections on public diplomacy and foreign policy communication. *International Journal of Communication*, 14, 2728–2748.
- Vun, S., Susanto, R., & Halkis, M. (2024). Pol Pot's military strategy: A study on Khmer Rouge guerrilla tactics and territorial defense. *Jurnal Peperangan Asimetris*, 10(1), 87–88.
- Zannettou, S., Caulfield, T., Blackburn, J., De Cristofaro, E., Stringhini, G., & Sirivianos, M. (2018). Disinformation warfare: Understanding state-sponsored trolls on Twitter and their influence on the web. *Proceedings of the Web Conference*, 218–226.